



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PERTEMUAN WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA
DENGAN
KONSTITUEN PROVINSI PAPUA BARAT**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Pertemuan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIT s.d Selesai
Tempat : Hotel Vega Kota Sorong Provinsi Papua Barat
Acara : Gus Muhaimin Mendengar Konstituen Provinsi Papua Barat
Ketua : Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra
Sekretaris Rapat : Susantomo S.I.P M.AP.
Hadir : **1. Pimpinan**
- Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.SI
2. Narasumber
- Mustakim Rumaday
- Albar Mulges
3. Peserta Offline
- Lambertus Jitmau (Walikota Sorong)
- Hamzah (Rektor IAIN Kota Sorong)
- Nikodemus Sawen (Tokoh Adat)
- Mulyani
- Ismail Hammad Mail
- Rokhman
- Fahmi Hasan
- Safruddin Ramalean
4. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Watua DPR RI/Korkesra
5. Staff

I. PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
3. Bahwa Anggota Dewan adalah pejabat *elected* sebagai pemegang amanah suara rakyat, wajib melakukan agregasi dan artikulasi terhadap kehendak dan aspirasi rakyat.
4. Bahwa Anggota DPR RI wajib memperjuangkan program pembangunan untuk daerah pemilihan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI dengan Masyarakat Provinsi Papua Barat dilakukan secara Hybrid (Virtual dan offline) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra lebih banyak mendengar aspirasi dari masyarakat Papua Barat terutama yang terkait Isu sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang disampaikan saat melakukan dialog dengan tokoh akademisi, tokoh adat, agama serta masyarakat.

Tanggapan Masyarakat

Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diusung menjadi Walikota Sorong. Karena itu, dirinya akan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong. Lambertus juga menyampaikan terima kasih karena DPR RI telah memperjuangkan UU Otsus dan rencana pemekaran wilayah di Papua Barat untuk memperpendek rentang kendali layanan dan pembangunan.

Sementara itu, Rektor IAIN Kota Sorong Hamzah menyampaikan terima kasih karena DPR RI ikut memperjuangkan pengembangan IAIN Sorong dari sebelumnya STAIN yang selama 13 tahun menjadi lembaga swasta di bawah Yayasan Hikmah. "Perlu ada percepatan. Kalau bisa tahun 2024, kita sepakat transformasi dari IAIN menjadi UIN demi mengembangkan potensi masyarakat. Dengan Perubahan UIN berpotensi bisa mengembangkan masyarakat di Papua Barat.

Tokoh adat Suku Abun Kabupaten Tambrau Nikodemus Sawen menyampaikan bahwa saat ini di wilayahnya masih terkendala infrastruktur dasar pembangunan. Pendidikan, kesehatan dan pertanian masih sangat terkendala. Pembangunan infrastruktur jalan dari ibu kota kabupaten ke ibukota kecamatan belum terakses. Dari distrik ke kampung-kampung juga belum terakses. Banyak anak disekolahkan di kota karena tidak ada layanan pembangunan pendidikan di kampung.

Mulyani, salah seorang ibu rumah tangga, menyampaikan aspirasinya bahwa saat ini dia Bersama keluarganya menempati rumah berukuran 2x3 meter yang sangat tidak layak karena terkena musibah banjir. Selain itu, karena tidak ada biaya, anak-anaknya terpaksa putus sekolah. Saya tidak tega, anak-anak yang seharusnya masih sekolah, terpaksa harus bekerja karena ayahnya diputus dari pekerjaannya, dan anak-anak saya semua putus sekolah.

Tanggapan A. Muhaimin Iskandar

Mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan warga Papua Barat, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra siap memperjuangkannya di DPR bagi kesejahteraan Papua. Secara bersama-sama, seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan di DPR. Saya akan terus berjuang bagi kesejahteraan Papua. Hati saya selalu bersama sama masyarakat Papua.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra mengatakan, harapan baru untuk Papua Barat saat ini lebih baik dan semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Otsus Nomor 2 tahun 2021, perubahan kedua dari UU sebelumnya Nomor 21 Tahun 2001. Beberapa capaian luar biasa dari perjuangan UU Otsus yang baru ini, di antaranya pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk Papua yang dulu hanya 2%, kini meningkat menjadi 2,25 %.

Kedua, anggota DPRD jalur pengangkatan yang dulu hanya berlaku di DPRD Provinsi, kini telah mengakomodir jalur pengangkatan anggota DPRD di kabupaten/kota se-Papua Barat, sesuai mekanisme dan peraturan yang akan disusun kemudian.

Terobosan kebijakan ini merupakan solusi terbaik, kebijakan yang kompromistis, dari ditiadakannya partai politik lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan putra-putri terbaik Papua Barat dapat memberikan kontribusi terbaik untuk pembangunan Papua Barat sekaligus untuk Indonesia tercinta.

Ketiga, UU Otsus dulu hanya melahirkan 1 Peraturan Pemerintah, yakni adanya lembaga kultur orang asli Papua Majelis Rakyat Papua. Kini, akan ada 7 buah produk Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam bentuk rancangan.

Disisi lain, Papua Barat dalam 2 tahun terakhir ini selalu dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Hal ini sangat membanggakan dan layak kita terus pertahankan. Toleransi antar sesama anak-anak bangsa merupakan modal sosial yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan.

Meneladani spirit perjuangan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh yang mampu mendengar rakyat Papua. Keteladanan beliau sudah banyak kita baca, kita dengar, dan akan kita wariskan kepada bangsa Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra ini mengatakan, ada dua hal mendasar dan fundamental untuk membangun Papua dan Papua barat di masa depan. Pertama, pembangunan harus berpijak dan berlandas pada jalan kebudayaan/pendekatan budaya. Nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua.

Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki, tidak terasing di tanah kelahirannya,” katanya.

Kedua, masa depan Papua Barat hanya bisa diwujudkan dengan melakukan transformasi dari pembangunan yang bersifat eksklusif ke inklusif. Pendekatan eksklusif pada masa lalu di bumi Papua telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau eksklusi sosial masyarakat Papua sendiri.

Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial.

III. PENUTUP

Pertemuan ditutup Pukul 14.30 WIT

**A.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**



Susantomo, S.I.P. M.AP.